

Invasi Inggris ke Jawa dan Kebijakan Thomas Stamford Raffles (1811–1816): Analisis Dampak Politik, Ekonomi, dan Sosial terhadap Masyarakat Jawa

Anggi Johari Sitanggang¹ Manda Putri Berutu² Izza Syafinas Nurafitha HSB³ Ananda
Almi Fadilah⁴ Yolanda Rotua Purba⁵

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: gi7tanggang@gmail.com¹ mandaputriberutu941@gmail.com²

izzasyafinas06@gmail.com³ anandaalmi57@gmail.com⁴ yolandarotuapurba@gmail.com⁵

Abstrak

Invasi Inggris ke Jawa pada tahun 1811 terjadi dalam konteks melemahnya kekuasaan Belanda akibat Perang Napoleon, sehingga membuka peluang bagi Inggris untuk mengambil alih Jawa sebagai bagian dari strategi global melawan Prancis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dinamika invasi Inggris, menganalisis kebijakan utama Thomas Stamford Raffles selama pemerintahannya, serta menilai dampaknya terhadap struktur politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Jawa. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis berbagai sumber primer dan sekunder terkait periode kolonial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Raffles menerapkan sejumlah reformasi penting, seperti sistem Landrente, Indirect Rule, penghapusan perbudakan, serta reorganisasi birokrasi yang mengurangi peran bangsawan tradisional. Kebijakan-kebijakan tersebut membawa perubahan dalam tata kelola kolonial dan mendorong integrasi ekonomi Jawa ke jaringan perdagangan global, namun juga menimbulkan beban pajak baru, ketidakstabilan politik, serta tekanan sosial bagi masyarakat, terutama petani. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintahan Raffles memberikan kombinasi dampak progresif dan problematis, serta berakhir seiring perubahan politik Eropa setelah kekalahan Napoleon dan penandatanganan Konvensi London 1814 yang mengembalikan Jawa kepada Belanda.

Kata Kunci: Invasi Inggris, Thomas Stamford Raffles, Jawa

Abstract

The British invasion of Java in 1811 occurred within the context of the weakening Dutch authority as a result of the Napoleonic Wars, which opened an opportunity for Britain to seize Java as part of its global strategy against France. This study aims to explain the dynamics of the British invasion, analyze the major policies implemented by Thomas Stamford Raffles during his administration, and assess their impact on the political, economic, and social structures of Javanese society. The research employs a descriptive qualitative method using a literature-based approach through the analysis of various primary and secondary sources related to this colonial period. The findings show that Raffles introduced several significant reforms, including the Landrente system, Indirect Rule, the abolition of slavery, and the reorganization of the bureaucracy, all of which reduced the authority of traditional Javanese elites. These policies reshaped colonial governance and encouraged Java's integration into global trade networks, yet also imposed new tax burdens, political instability, and social pressure on the population, particularly farmers. The study concludes that Raffles' administration produced both progressive and problematic impacts and ultimately ended following major political changes in Europe after Napoleon's defeat and the signing of the 1814 London Convention, which returned Java to Dutch control.

Keywords: British Invasion, Thomas Stamford Raffles, Java



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-19, Eropa berada dalam situasi geopolitik yang tidak stabil karena rangkaian Perang Napoleon. Konflik besar ini bukan hanya mempengaruhi negara-negara di benua Eropa, tetapi juga menjangkau wilayah kolonial yang berada di bawah kekuasaan

negara-negara yang terlibat perang. Belanda menjadi salah satu korban perubahan politik tersebut ketika jatuh ke tangan Prancis pada 1795, sehingga seluruh daerah koloninya, termasuk Jawa, berada di bawah pengaruh kekuasaan Prancis. Kondisi Belanda yang lemah akibat perang serta ketergantungannya pada Prancis membuat sistem pertahanan kolonialnya semakin rapuh dan tidak mampu berdiri sendiri menghadapi ancaman eksternal. Herman Willem Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808 dengan tugas utama memperkuat Jawa. Daendels berusaha membangun sistem administrasi dan pertahanan baru, termasuk pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan yang bertujuan mempercepat pergerakan pasukan serta memperbaiki komunikasi antardaerah. Meskipun melakukan berbagai reformasi, kemampuan Daendels tetap terbatas karena kurangnya sumber daya militer, logistik, dan pendanaan. Kelemahan ini memberikan peluang bagi Inggris, yang pada masa itu telah menguasai jalur laut internasional dan berusaha mengambil alih wilayah koloni Belanda untuk menghambat pengaruh Prancis di Asia.

Kondisi tersebut mendorong Inggris melaksanakan rencana invasi ke Jawa pada 1811. Dengan mengerahkan pasukan dari India serta kekuatan armada laut yang besar, Inggris berhasil mendarat dan menguasai wilayah penting di Jawa dalam waktu singkat. Setelah Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris, Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai pemimpin yang kemudian memperkenalkan sejumlah kebijakan baru di bidang administrasi, pertanian, perpajakan, dan hubungan dengan masyarakat lokal. Perubahan yang dilakukan Raffles inilah yang kemudian menjadi salah satu fase penting dalam sejarah kolonial di Jawa karena banyak kebijakan yang berpengaruh hingga masa pemerintahan berikutnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana proses invasi Inggris ke Jawa berlangsung, kebijakan apa saja yang diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles, dan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat Jawa. Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan secara menyeluruh dinamika invasi, isi kebijakan, serta pengaruhnya bagi konteks sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis dan praktis, yakni memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai periode singkat pendudukan Inggris, memperkaya literatur sejarah kolonial, dan menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti yang mempelajari sejarah Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi. Melalui pendekatan ini, peristiwa tersebut dipelajari secara mendalam dengan tujuan menemukan pola-pola yang muncul dari kejadian tersebut (Yuliani, 2018). Penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, konteks, dan dinamika konflik melalui interpretasi peneliti terhadap sumber referensi yang relevan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini et al., 2022). Dalam prosesnya, penulis menggunakan artikel jurnal dan buku yang membahas tentang Invasi Inggris ke Jawa dan Kebijakan Thomas Stamford Raffles (1811–1816). Setiap sumber yang digunakan penulis dipelajari terlebih dahulu, kemudian dibandingkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana konflik tersebut muncul, faktor-faktor yang membuatnya terus berlanjut, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Politik Internasional dan Nusantara Menjelang Invasi Inggris

Perang Napoleon yang berkecamuk di Eropa pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 membawa dampak besar bagi Belanda dan seluruh jajahan yang berada di bawah kendalinya. Setelah Belanda jatuh ke tangan Prancis pada 1795 dan berubah menjadi Republik Bataaf, negara tersebut semakin berada dalam kendali politik Prancis, hingga Napoleon mendirikan Kerajaan Holland pada 1806 dan kemudian mengambil alih Belanda secara langsung pada 1810. Kondisi ini membuat pertahanan kolonial Belanda melemah, termasuk di Nusantara, karena sebagian besar kekuatan militer dan sumber daya mereka terserap untuk kepentingan perang di Eropa. Sementara itu, Inggris yang menguasai laut setelah kemenangan besar di Trafalgar (1805) semakin gencar merebut koloni-koloni Belanda agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Situasi inilah yang menjadi latar belakang munculnya rencana Inggris untuk menyerang dan menguasai Jawa pada 1811 (Noor, 2014).

Di Jawa, Herman Willem Daendels yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808–1811 berusaha keras memperkuat pertahanan wilayah tersebut. Ia menerapkan berbagai reformasi penting, baik dalam bidang administrasi maupun militer. Salah satu proyek terbesarnya adalah pembangunan Grote Postweg, jalan raya pos yang membentang dari Anyer hingga Panarukan untuk memudahkan pergerakan pasukan. Daendels juga memperkuat benteng-benteng di sepanjang pantai utara Jawa dan merapikan struktur pemerintahan agar lebih efektif. Namun, semua langkah ini tetap terbatas oleh kurangnya pasukan Eropa, persenjataan yang tidak memadai, serta lemahnya logistik. Akibatnya, meskipun ia berhasil memperbaiki pertahanan, upayanya hanya menunda, bukan menghentikan, invasi Inggris. Pembahasan mengenai kebijakan Daendels banyak ditemukan dalam studi-studi sejarah kolonial Belanda.

Di sisi lain, Inggris merancang penyerangan ke Jawa sebagai operasi militer amfibi besar yang mengandalkan kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Mereka memanfaatkan pengalaman dalam operasi serupa di berbagai wilayah Asia dan membawa pasukan dari India (Bengal Army), lengkap dengan kapal perang, kapal logistik, artileri, dan ribuan tentara. Inggris memilih lokasi pendaratan yang tidak terlalu dijaga untuk menghindari bentrokan besar pada tahap awal, kemudian melakukan gerak cepat menuju pusat pemerintahan di Batavia dan daerah strategis lainnya. Tujuan mereka bukan hanya mengambil alih Jawa dari Belanda, tetapi juga mencegah Prancis menjadikannya basis kekuatan di Asia Tenggara. Strategi militer ini banyak dibahas dalam kajian sejarah perang dan ekspansi Inggris pada awal abad ke-19.

Serangan Inggris ke Jawa pada 1811 berlangsung sangat cepat. Pasukan mereka mendarat pada awal Agustus di sekitar Cilincing, dekat Batavia, dan langsung bergerak masuk ke kota yang saat itu sudah rapuh akibat wabah penyakit dan buruknya kondisi sanitasi. Pertahanan Belanda tidak mampu bertahan lama sehingga Batavia jatuh hanya beberapa hari setelah pertempuran pertama. Pertahanan terbesar Belanda berada di Meester Cornelis (kini Jatinegara), tetapi benteng tersebut pun dikuasai Inggris setelah pertempuran besar pada akhir Agustus. Setelah itu, pasukan Inggris bergerak ke kota-kota penting lainnya, termasuk Semarang, yang akhirnya menyerah karena Belanda tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan terkoordinasi. Pada September 1811, seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris. Kronologi ini banyak dicatat dalam laporan-laporan militer Inggris serta penelitian modern tentang invasi Jawa.

Perjanjian Tuntang dan Pengalihan Kekuasaan ke Inggris

Perjanjian Tuntang, yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1746, merupakan sebuah perjanjian yang memiliki implikasi signifikan dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam konteks kolonialisme Belanda. Perjanjian ini merupakan hasil dari serangkaian konflik

antara VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dan Sultan Pakubuwana II dari Mataram, yang merupakan sebuah kerajaan di Jawa, Indonesia. Dalam perjanjian ini, Sultan Pakubuwana II mengakui kedaulatan VOC atas wilayah-wilayah yang telah direbut oleh VOC, termasuk Semarang, Pekalongan, dan Cirebon. Perjanjian ini juga memberikan VOC kontrol atas Jawa Tengah, termasuk wilayah-wilayah yang sekarang menjadi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain itu, Sultan Pakubuwana II diwajibkan membayar ganti rugi kepada VOC sebesar 20.000 real (SETYAWAN, 2020).

Perjanjian Tuntang memiliki beberapa implikasi penting dalam sejarah Indonesia. Pertama, perjanjian ini menandai awal dari kolonialisme Belanda di Indonesia, yang berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Kedua, perjanjian ini memberikan VOC pengaruh besar atas politik Mataram, termasuk hak untuk menunjuk dan memecat pejabat-pejabat Mataram. Ketiga, perjanjian ini menghapuskan pengaruh asing lainnya, seperti Portugis dan Inggris, dari Jawa. Dalam konteks yang lebih luas, Perjanjian Tuntang merupakan contoh dari proses kolonialisme yang terjadi di banyak negara di Asia dan Afrika pada abad ke-18 dan ke-19. Perjanjian ini menunjukkan bagaimana kekuatan kolonial dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengontrol dan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia di negara-negara yang dijajah. Dalam historiografi Indonesia, Perjanjian Tuntang sering dianggap sebagai titik balik dalam sejarah Indonesia, karena ia menandai awal dari kolonialisme Belanda yang berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Perjanjian ini juga memiliki implikasi yang signifikan dalam sejarah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia, karena ia mempengaruhi perkembangan negara dan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dalam analisis yang lebih mendalam, Perjanjian Tuntang dapat dilihat sebagai contoh dari teori kolonialisme yang dikembangkan oleh para ahli seperti Frantz Fanon dan Edward Said. Perjanjian ini menunjukkan bagaimana kolonialisme dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengontrol dan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia di negara-negara yang dijajah. Selain itu, perjanjian ini juga menunjukkan bagaimana kolonialisme dapat mempengaruhi identitas dan budaya masyarakat yang dijajah, serta bagaimana ia dapat mempengaruhi perkembangan negara dan masyarakat yang dijajah.

Profil dan Pemikiran Thomas Stamford Raffles

Thomas Stamford Raffles adalah seseorang yang lahir di lepas pantai Jamaica dekat dengan Port Morant pada tanggal 6 Juli 1781, beliau lahir dengan pasangan suami istri bernama Benjamin Raffles (1739-1812) dan Anne Lyde Linderman (1752-1824). Masa kecilnya dihiasi dengan krisis ekonomi yang pada saat itu melanda inggris dan menyebabkan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi yang berada di tahap masa kecilnya dihiasi dengan krisis ekonomi yang pada saat itu melanda inggris dan menyebabkan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi di skala yang cukup sulit. Keadaan ini membuat Raffles segera mencari pekerjaan demi menopang kerentanan ekonomi keluarganya. Pekerjaan pertama iya dapatkan melalui teman ayahnya dengan profesi juru tulis di perusahaan Hindia-Timur tahun 1795. Berkat kepribadian yang cepat beradaptasi beliau segera dipromosikan sebagai asisten sekretaris di perusahaan yang sama namun di wilayah kepulauan melayu(Syafaah, 2018).

Pada paruh kedua abad 18 terjadi dua revolusi yang membuat perubahan sosial dan budaya pada masyarakat dunia khususnya Eropa, kedua revolusi itu adalah revolusi Amerika pada tahun 1776 dan juga revolusi Perancis pada tahun 1789, revolusi Perancis ini yang membuat Raffles berpikir bahwa kelas menengah atau borjuis memaksa kalangan bangsawan untuk menyetujui pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, beliau merupakan pelaku sekaligus produk dari gerakan humanisme pada abad ke-18 tersebut. Pola pemikiran beliau terinspirasi dalam alam pencerahan Perancis beserta tiga pendekar utama pencerahan Eropa yakni Voltaire, Montesquieu, dan JJ Rousseau. Tangisan di revolusi Perancis akan kebebasan,

kesetaraan dan juga persaudaraan membimbing setiap orang untuk mencarinya dan menuntut keadilan dunia. Atasan Raffles yakni William Ramsay melihat ketekunan dalam diri Raffles yang selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Iya bahkan sangat sering mengambil jam lembur dan pendapatannya diberikan pada kedua orang tuanya, tapi Raffles tidak pernah mengeluh dan terus bersemangat dalam mengembangkan kecakapan berbahasa perancisnya yang membawanya untuk menguasai literatur Eropa, inilah alasan mengapa Raffles dipromosikan dan mengirimnya ke Penang (Hariyono & Wijaya, 2016).

Munculnya nama Stamford bukanlah bawaan lahir, nama itu ya dapatkan saat berhasil menjadi individu yang diperhitungkan pada kawasan laut cina selatan melalui hasil kinerja baiknya di perusahaan dagang yang ia jalani. Salah satu dari langkah terbesar dalam hidupnya adalah satya diputus ke pulau penang tahun 1804 untuk melaksanakan tugas dari atasannya. Karirnya kemudian semakin melesat terutama pada tahun 1811 sampai 1817 ketika beliau diikutsertakan dalam rombongan ekspedisi ke wilayah tana jawa sebagai letnan gubernur di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Sir Elliot Murray Kynynmod (1751-1814) yang lebih dikenal jalan sapaan Lord Minto. Raffles memiliki jabatan sebagai pemimpin tertinggi dari pemerintahan inggris di tanah jawa dan melakukan banyak perubahan kebijakan di wilayah jawa sepeninggalan pemerintahan belanda yang sebelumnya menguasai daerah tersebut (Syafaah, 2018).

Pada masa pemerintahannya beliau melakukan reformasi kebijakan karena merasa kolonialisme yang dibawa VOC tidak humanis, dia mengeluarkan kebijakan yang ia rasa bersifat humanis di kepemimpinannya yang sangat singkat tersebut, ia menggunakan pajak sebagai penghapus praktek perbudakan secara khusus dan demi kemaslahatan umat yang umum. Dalam pemerintahannya Raffles dikenal sebagai penulis buku berjudul "Historis Of Java" pada buku ini ia terlihat memiliki keinginan untuk menciptakan tatanan liberal di tanah jajahannya, namun dari pandangan lawannya yakni VOC menganggapnya hanya bertujuan untuk mencari keuntungan dan menjadikan penduduk wilayah Jawa sebagai komoditas yang menguntungkannya, menurut Raffles sudah sewajarnya pemerintah menghilangkan praktik penindasan tersebut dan menentukan sistem bagi hasil yang lebih adil. Dia kemudian merubah sistem penerimaan dana pemerintah termasuk soal pajak pertanian, menurutnya perubahan sistem yang harus ia lakukan adalah penghapusan semua layanan feodal dan seluruh praktek pengambilan hasil panen secara paksa dan memberikan kebebasan bagi para petani, lalu pemerintah juga harus ikut mengawasi pertanian yang ada termasuk harus ikut mengelola bagi hasil dan pengumpulan sewa tanah, serta sewa tanah harus diperhitungkan ke pemerintah berdasarkan luas serta kondisi yang sebenar-benarnya dengan perhitungan yang adil. Pada masa kepemimpinannya beliau sangat menaruh perhatian pada budaya dan sastra Jawa yang mendorongnya untuk mengembangkan museum etnografi Batavia yang nantinya menjadi museum gajah di Jakarta (Hariyono & Wijaya, 2016). Perbedaan iklim yang terjadi di inggris dan indonesia terutama nya di pulau jawa membuat Raffles seringnya tidak mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut yang membuat beliau sering didera penyakit (Utomo, 2018).

Kebijakan Utama Raffles dalam Pemerintahannya

Pada masa pemerintahannya Raffles banyak membuat kebijakan-kebijakan di daerah yang ia kuasai terkhususnya di pulau Jawa, namun pada masa kepemimpinannya ini masih banyak kerajaan di nusantara yang membuat kebijakannya sendiri tanpa melibatkan beliau di dalamnya sehingga beliau mengirimkan surat kepada raja-raja yang berkuasa tersebut agar bisa diajak bekerja sama dengan pemerintahan Inggris melalui beliau, beliau memang lebih mengedepankan diplomasi daripada jalan kekerasan seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya yakni kolonial Belanda melalui VOC, namun jalan diplomasi mendapatkan pertentangan dari raja-raja nusantara tersebut sehingga akhirnya Raffles juga menggunakan

kekuatan militer pemerintahan Inggris demi menundukkan kerajaan yang tidak mau bekerjasama dengan kepemimpinannya. Dia memutuskan mengambil ahli kekuasaan dan kendali atas urusan desa-desa dari para raja, 1813 Sultan Banten menyerahkan pemerintahan kerajaannya pada kepemimpinan Raffles dan diikuti Cirebon pada dua tahun kemudian. Cara Raffles menguasai nusantara juga khas dengan penjajahan Inggris, beliau memberikan jabatan kepada kepala-kepala daerah pribumi untuk memerintah di wilayahnya masing-masing namun tetap harus tunduk di bawah kepemimpinannya sehingga masyarakat yang melihat itu tidak merasa sebuah perasaan bahwa mereka sedang dijajah karena pemimpin yang mereka dengarkan atau memberi arahan adalah Bumiputera (Sinaga et al., 2024). Pada masa pemerintahan Raffles banyak kebijakan yang sudah ia lakukan, maka beberapa diantaranya ialah

1. Sistem Landrente

Sejatinya sistem ini adalah sebuah pajak yang dibuat oleh Raffles dengan pemikiran bahwasannya tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah Inggris merupakan tanah milik mereka, sehingga masyarakat diharuskan menyewa tanah tersebut dengan didasarkan pada kualitas tanah dan tanaman apa yang sedang dibudidayakan dengan pandangan ini dianggap tidak memberatkan masyarakat pribumi. Raffles mendorong pertanian dengan menekan pada penanaman tanaman ekspor yang bernilai tinggi seperti kopi, gula dan rempah-rempah, sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan kolonial dan menjadikan Hindia Belanda sebagai produsen utama tanaman ekspor di dunia. Meskipun kebijakan ini membawa kemajuan dalam pengelolaan tanah dan pertanian dampak sosialnya cukup kompleks, karena salah satu dampak yang paling mencolok adalah pengusuran petani kecil dari tanah mereka, pada banyaknya kejadian untuk meningkatkan produksi dan efisiensi tanah kecil itu diambil dan digabung menjadi lahan yang luas sehingga dikelola oleh pengusaha atau perusahaan yang diorientasikan pada produksi komersial dari hal ini menciptakan ketidakadilan di mana banyak petani kehilangan sumber kehidupan mereka dan dipaksa mencari cara untuk bertahan di tengah perubahan yang cepat ini (Rosmaida Sinaga, Andrian Maulana, Rifka Ariani Lubis, 2024).

Pada pelaksanaannya praktik ini tidak dilaksanakan di seluruh Pulau Jawa, wilayah tersebut umumnya milik swasta ataupun daerah Parahyangan masih terjadi sistem tanam paksa terutama dalam pertanian kopi, misal saja di daerah sekitar Jakarta yang masa itu Batavia Parahyangan sistem sewa tanah ditiadakan sebab daerah ini adalah bermayoritas milik swasta sedangkan daerah pariangan pemerintahan kolonial keberatan untuk menghapus sistem paksa kopi yang memberi mereka keuntungan besar. Adapun beberapa daerah yang menjadi pos utama dalam pemungutan pajak di wilayah Jawa dalam masa kepemimpinan Raffles antara lain adalah Probolinggo, dan Panarukan (SETYAWAN, 2020).

2. Sistem Tribute

Sistem ini merupakan suatu tindakan memberikan sumbangan wajib yang dibuat Raffles dengan penetapan pada 11 Agustus 1811, peraturan ini mewajibkan setiap kawasan yang ada di bawah kepemimpinannya harus membayar sebanyak 50 pound per tahunnya, sistem ini adalah pengganti daripada sistem tanam paksa yang dibuat oleh kongsi dagang VOC yang dianggap kepemimpinan Raffles memberatkan kepala daerah sehingga tidak sesuai dengan pandangan liberalis Raffles, namun terdapat beberapa kepala daerah yang melakukan penyelewengan dana sumbangan wajib ini sebab kurangnya kompetensi kepala daerah di beberapa kedisidenan sehingga dana-dana yang tidak sampai ke tangan pemerintahan Raffles membuat kerugian di pihak kepemimpinan Inggris (Sinaga et al., 2024).

3. Sistem Indirect Rules

Sistem ini dibuat kepemimpinan Raffles untuk menempatkan para pemimpin bumi putera sebab kebijakan yang dibuat kepemimpinan Inggris sebelumnya yang menempatkan orang-orang Inggris malah hanya merugikan, Raffles menempatkan para pemimpin bumi putera diberi beberapa kriterianya karena pemimpin daerahnya merupakan Bumiputera masyarakat tidak merasa mereka sedang dijajah sehingga kepemimpinan Raffles bisa berjalan dan para pemimpin bumi putera ini harus tunduk kepada Raffles, keterlibatan Raffles dalam pembentukan aturan juga diharuskan jika ada usulan peraturan baru daripada pemimpin Bumiputera ini (Sinaga et al., 2024).

4. Penghapusan Perbudakan

Penghapusan perbudakan yang diterapkan Raffles adalah bentuk dari pandangannya pada mewujudkan kesetaraan juga keadilan pada masyarakat yang mana Raffles sendiri menganggap bahwa perbudakan adalah suatu roda yang kuno dalam sosial masyarakat dan tidak relevan bagi beliau, dengan adanya peristiwa besar yang ada di Eropa soal menuntut kesetaraan dan doktrin dari revolusi Perancis pada alam pencerahan yang mencanangkan akan ketaatan dan keadilan membuat penghapusan perbudakan pada masa kepemimpinan Raffles merupakan bentuk konsistensi pemerintahannya dalam liberalisme

Analisis Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat Jawa

Raffles menerapkan sistem pemerintahan baru yang secara bertahap mengurangi peran dominan raja dan bangsawan di Jawa. Kekuasaan yang sebelumnya berada sepenuhnya di tangan kerajaan, terutama dalam urusan administrasi, perpajakan, dan pengelolaan tanah, kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial Inggris. Dampaknya, posisi bangsawan lebih banyak bersifat simbolis dan tidak lagi memiliki fungsi pengendali kekuasaan seperti sebelumnya. Langkah Raffles ini merupakan bagian dari usahanya untuk mengubah tata pemerintahan tradisional Jawa menjadi sistem pemerintahan modern versi kolonial. Melalui penerapan Aturan Tidak Langsung Perubahan tersebut sekaligus menandai melemahnya praktik feodalisme di Jawa. Raja dan bangsawan tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, tetapi ditempatkan dalam struktur pemerintahan kolonial yang dikendalikan langsung oleh Inggris. Secara politik, kebijakan yang diterapkan Raffles menyebabkan melemahnya kekuasaan tradisional raja dan bangsawan di Jawa. Melalui sistem *Indirect rule*, Raffles meng penyerangan Keraton Yogyakarta. Serangan Setelah penyerangan itu, struktur birokrasi di Jawa berubah mengikuti model kolonial yang lebih tersentralisasi. Pejabat pribumi tetap dilibatkan, namun mereka hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di bawah pengawasan langsung pemerintah Inggris. Otoritas politik Sultan menjadi sangat terbatas dan ketergantungannya terhadap kolonial semakin kuat. Selain itu, peristiwa penyerangan tersebut juga berdampak pada semakin rendahnya posisi bangsawan dalam struktur kekuasaan. Inggris menegaskan dominasinya dengan mengasingkan Sultan Hamengkubuwono II, sehingga pengaruh politik kesultanan semakin dilemahkan. Dengan demikian, penyerangan Keraton Yogyakarta bukan sekedar operasi militer, namun menjadi momentum penting yang menampilkan penyusutan kekuasaan tradisional Jawa dan penguatan kontrol Inggris di bidang politik.

Raffles membentuk model birokrasi baru yang lebih terpusat dan mengikuti gaya administrasi kolonial Eropa. Sistem Indirect Rule menempatkan bupati sebagai pejabat pemerintah kolonial, bukan lagi sebagai bangsawan independen. Hal ini memperkuat kontrol Inggris atas wilayah Jawa dan membuat struktur pemerintahan tradisional melemah. Birokrasi Jawa berubah drastis ketika Raffles mengangkat pegawai Eropa (*controleur*) untuk mengawasi bupati. Bupati dan pejabat lokal yang sebelumnya memiliki otonomi kemudian berubah menjadi bagian dari mesin pemerintahan kolonial. Model birokrasi kolonial yang terpusat ini menjadikan Inggris sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sementara pejabat pribumi

diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Raffles membentuk struktur birokrasi baru yang lebih terpusat. Ia memperkenalkan jabatan controleur dan menempatkan pegawai Eropa pada posisi strategis di distrik. Meskipun awalnya ingin menghapus feodalisme, pada akhirnya Raffles menyadari bahwa bupati tetap memegang peran penting dalam mengatur rakyat sehingga mereka tetap diberdayakan. Namun, kedudukan mereka sudah berubah: bukan lagi penguasa mandiri, tetapi perpanjangan tangan pemerintah kolonial Inggris. (Sinaga et al., 2024)

Dalam bidang ekonomi, penerapan Sistem Landrente atau sewa tanah justru menimbulkan beban baru bagi rakyat. Selain itu, kebijakan penjualan wilayah seperti Probolinggo menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di tingkat lokal. Reformasi ekonomi yang dilakukan Raffles juga membuka Jawa ke jaringan ekonomi kolonial global, sehingga orientasi ekonomi mulai diarahkan untuk kepentingan perdagangan internasional. Sistem Landrente membuat rakyat kecil harus membayar pajak berdasarkan sewa tanah. Meskipun dimaksudkan lebih “manusiawi” daripada tanam paksa VOC, dalam praktiknya justru membebani rakyat karena banyak yang belum mengenal transaksi uang. Kondisi ini menambah tekanan ekonomi bagi petani Jawa. Kebijakan Landrente atau sewa tanah diterapkan untuk menggantikan sistem tanam paksa VOC. Secara teori, Landrente dianggap lebih manusiawi karena memberi kebebasan petani menentukan tanaman yang ingin mereka tanam. Namun dalam praktiknya, Landrente menambah beban rakyat karena rakyat harus membayar pajak dalam bentuk uang, banyak petani belum terbiasa dengan ekonomi uang, pejabat lokal masih melakukan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, sistem ini justru menimbulkan tekanan ekonomi yang lebih berat bagi petani.

Penjualan wilayah Probolinggo kepada pihak swasta menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Inggris lebih mengutamakan keuntungan kolonial. Hal ini membuat masyarakat lokal semakin tidak berdaya karena tanah tempat mereka hidup dapat dipindahtangankan tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat. Kebijakan ini semakin memperburuk keadaan rakyat karena wilayah yang dijual sering diperintah secara lebih keras oleh pembeli, yang biasanya hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi Raffles masih menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Raffles juga melakukan penjualan wilayah, salah satunya Probolinggo, kepada Kapitan Cina Han Kik Ko. Hal ini menandakan bahwa kebijakan ekonomi Inggris tetap berorientasi pada keuntungan kolonial. Penjualan wilayah membuat rakyat semakin tertekan karena penguasa baru biasanya bertindak lebih keras dalam memungut pajak demi menutup modal pembelian tanah. Raffles membuka Jawa lebih luas ke sistem ekonomi global. Tanaman komoditas semakin diarahkan untuk ekspor, dan Jawa semakin terintegrasi dalam jaringan perdagangan internasional. Namun, keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak kolonial, bukan masyarakat lokal. Di bawah Raffles, Jawa semakin terintegrasi dengan jaringan perdagangan internasional. Produksi pertanian diarahkan pada komoditas ekspor, sehingga orientasi ekonomi semakin bergeser dari kebutuhan rakyat menuju kepentingan kolonial. Arah ekonomi global ini memang meningkatkan nilai perdagangan, tetapi sebagian besar keuntungan tetap mengalir ke pemerintah kolonial dan pengusaha Eropa (Yusup Hari Setyawan, 2020).

Perubahan kebijakan menyebabkan pergeseran struktur masyarakat Jawa, terutama karena peran bangsawan melemah dan kedudukan bupati ditempatkan sebagai pegawai kolonial. Walaupun Raffles menghapus perbudakan, kondisi rakyat secara umum tidak banyak membaik, sebab beban pajak dan kewajiban lain tetap berat. Sistem baru juga menciptakan ketidakpuasan, sehingga muncul berbagai keresahan dan perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Inggris. Struktur sosial masyarakat berubah karena melemahnya kekuasaan bangsawan dan meningkatnya peran pegawai kolonial Eropa. Priyayi tetap memegang posisi

sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, tetapi peran mereka tidak lagi setinggi pada masa sebelum Inggris datang. Petani menjadi kelompok yang paling terdampak karena mereka tetap berada dalam posisi paling bawah tanpa perlindungan yang cukup. Meski Raffles menghapus perbudakan, kehidupan rakyat tidak serta-merta membaik. Beban pajak yang berat, kewajiban sewa tanah, serta perubahan ekonomi membuat banyak rakyat hidup dalam kesulitan. Reformasi yang bersifat modern justru tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Jawa. Raffles menghapus perbudakan dan kerja paksa, kondisi rakyat kecil belum banyak berubah. Beban pajak yang tinggi, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat lokal, dan kecenderungan pemerintah kolonial memperbesar kekuasaan pegawai Eropa membuat kehidupan rakyat tidak jauh lebih baik dibanding masa sebelumnya.

Ketidakpuasan terhadap pajak dan perubahan struktur kekuasaan memunculkan berbagai bentuk perlawanan. Rakyat maupun bangsawan menunjukkan penolakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kebijakan Inggris yang dianggap tidak sesuai dengan adat dan kondisi masyarakat. Tekanan pajak dan perubahan struktur kekuasaan memunculkan keresahan sosial. Beberapa daerah menunjukkan bentuk perlawanan, baik secara terbuka maupun terselubung, sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi Jawa. Kebijakan kolonial sering kali dianggap mengabaikan nilai-nilai sosial masyarakat. Di beberapa wilayah seperti Besuki dan Probolinggo, konflik antara kepala desa dan pemungut pajak terjadi karena ketidakpuasan terhadap sistem pajak. Banyak digambarkan dalam jurnal bahwa kebijakan Raffles justru menciptakan ketegangan baru yang menyebabkan sebagian rakyat melakukan penolakan, baik langsung maupun terselubung (Nurbaiti, 2025).

Kebijakan Raffles memberikan dampak yang bersifat campuran, ada dampak positif dan dampak negatif: *Dampak Positif*: Penghapusan perbudakan yang membuka jalan bagi kebebasan sosial, Reformasi administrasi yang lebih rapi, meski masih mengutamakan kolonial, Upaya pengurangan kerja paksa dan perubahan sistem ekonomi yang lebih rasional. *Dampak Negatif*: Beban pajak rakyat semakin berat karena Landrente, Melemahnya kekuasaan tradisional dan terganggunya stabilitas politik, Penyerangan Keraton Yogyakarta yang menimbulkan trauma sosial dan politik, Rakyat tetap hidup dalam kesulitan ekonomi meski reformasi dijalankan, Penjualan wilayah dan kebijakan ekonomi liberal yang merugikan masyarakat lokal (Wahyu & Putro, n.d.).

Faktor Penyebab Berakhirnya Pemerintahan Inggris di Jawa

1. Kekalahan Napoleon dan Perubahan Besar dalam Politik Eropa

Berakhirnya pemerintahan Inggris di Jawa tidak dapat dipisahkan dari gejolak politik yang melanda Eropa pada awal abad ke-19. Inggris menguasai Jawa bukan karena ambisi kolonial murni, tetapi sebagai bagian dari strategi perang untuk melemahkan Prancis. Pada masa itu, Belanda berada di bawah kekuasaan Napoleon, sehingga koloni-koloni Belanda dianggap sebagai perpanjangan tangan kekuatan Prancis. Dengan demikian, pendudukan Inggris atas Jawa lebih merupakan tindakan militer sementara sebuah langkah perang, bukan rencana ekspansi jangka panjang (Setyawan, 2020). Ketika Napoleon akhirnya dikalahkan pada tahun 1814–1815, seluruh sistem kekuasaan Eropa berubah. Negara-negara besar yang sebelumnya bertikai mulai menata ulang keseimbangan politik demi stabilitas benua. Kemenangan atas Prancis membuat Inggris tidak lagi memiliki alasan strategis untuk tetap menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka ambil dari Belanda. Dunia Eropa memasuki fase rekonsiliasi, dan salah satu prinsip utamanya adalah pengembalian wilayah koloni kepada pemilik asalnya sebelum masa pendudukan Prancis. Kekalahan Napoleon ini menjadi titik balik. Seluruh perhitungan politik Inggris terhadap

Jawa berubah total. Apa yang sebelumnya dianggap wajar selama perang yaitu pendudukan wilayah musuh menjadi tidak sah menurut konsensus internasional setelah perang berakhir. Karena itu, arah perubahan politik Eropa secara otomatis mendorong Inggris untuk melepaskan Jawa.

2. Konvensi London 1814: Dasar Hukum Pengembalian Jawa

Perubahan politik Eropa kemudian diperkuat dengan munculnya sebuah perjanjian resmi yang menjadi pijakan hukum bagi penyerahan Jawa kembali kepada Belanda, yaitu Konvensi London 1814 (juga dikenal sebagai Konvensi Anglo-Belanda). Dalam perjanjian ini, Inggris dan Belanda menyepakati penataan ulang wilayah koloni yang sempat berpindah tangan selama masa perang dengan Prancis. Isi konvensi tersebut menegaskan bahwa: Seluruh wilayah Belanda yang sebelumnya dikuasai Inggris harus dikembalikan, termasuk Jawa, serta Inggris wajib menghormati pemulihan kekuasaan Belanda sebagai bagian dari rekonstruksi politik Eropa. Dengan adanya konvensi ini, Inggris tidak lagi memiliki ruang diplomatik untuk menunda atau menolak penyerahan Jawa. Ketentuan ini mengikat secara internasional dan menjadi dasar yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah Inggris, baik di London maupun oleh otoritas kolonial di Jawa. Konvensi London bukan sekadar kesepakatan administratif, tetapi merupakan simbol stabilitas Eropa pascaperang, sehingga negara yang melanggar konvensi berpotensi merusak tatanan internasional yang baru saja dipulihkan. Karena itu, Inggris harus mematuhi isi perjanjian tanpa syarat. Dari sinilah masa pemerintahan Inggris di Jawa mulai menuju akhir yang pasti.

3. Perubahan Kepentingan Strategis Inggris: Fokus Beralih ke India dan Malaya

Di luar tekanan politik internasional, terdapat juga faktor internal yang membuat Inggris tidak tertarik mempertahankan Jawa. Setelah perang besar di Eropa selesai, Inggris kembali menilai daerah mana yang benar-benar penting bagi kekuatan imperiumnya. Dalam proses evaluasi itu, India muncul sebagai pusat utama ekonomi, politik, dan militer. India adalah “permata” dalam mahkota imperium Inggris, dan seluruh strategi kolonial mereka diarahkan untuk menjaga serta memperkuat posisi tersebut (Sinaga et al., 2024). Sementara itu, Jawa dinilai tidak memiliki nilai strategis sebesar India. Meskipun Jawa kaya sumber daya dan memiliki penduduk yang besar, Inggris menganggap pulau ini terlalu jauh dari pusat operasi mereka di Asia Selatan. Selain itu, pemerintahan Raffles yang mencoba melakukan reformasi besar-besaran membutuhkan biaya tinggi, terutama dalam reorganisasi tanah, pembayaran pejabat lokal, dan infrastruktur pemerintahan. Para pejabat tinggi di London mulai melihat Jawa sebagai wilayah yang menyedot anggaran lebih besar daripada manfaat ekonominya. Ketika muncul perdebatan di pusat pemerintahan Inggris, banyak pejabat berpengaruh termasuk pengganti Lord Minto menilai bahwa mempertahankan Jawa tidak sebanding dengan biaya politik, diplomatik, maupun ekonomi yang harus ditanggung. Karena itu, ketika Konvensi London mewajibkan Inggris menyerahkan kembali Jawa, keputusan tersebut tidak menimbulkan perlawanan di kalangan pembuat kebijakan Inggris. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk mengurangi beban administrasi dan mengalihkan fokus ke wilayah yang benar-benar menjadi prioritas strategis.

4. Penyerahan Resmi kepada Belanda pada 19 Agustus 1816

Setelah seluruh keputusan politik dan diplomatik ditegaskan, proses penyelesaian administrasi di lapangan tinggal menunggu pelaksanaan. Pada tahun 1816, Thomas Stamford Raffles dipanggil pulang ke Inggris. Penarikan Raffles merupakan sinyal kuat bahwa Inggris sedang mempersiapkan transisi kekuasaan. Untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan sampai waktu penyerahan tiba, Inggris menugaskan pejabat sementara untuk mengelola administrasi dan mempersiapkan serah terima. Beberapa bulan

kemudian, perwakilan Belanda tiba di Jawa untuk mengambil alih pemerintahan. Pada 19 Agustus 1816, upacara resmi penyerahan kekuasaan dilaksanakan. Dengan prosesi ini, otoritas Inggris berakhir secara total, dan Belanda kembali menjadi penguasa kolonial di Jawa. Tanggal tersebut menjadi penanda berakhirnya periode singkat tetapi penting dalam sejarah Jawa, ketika Inggris sempat mengatur struktur administrasi, sistem tanah, ekonomi, dan tata politik lokal. Penyerahan ini bukan sekadar pergantian pemerintahan, tetapi bagian dari pergeseran besar dalam peta kolonial Asia Tenggara. Inggris berfokus ke India dan Semenanjung Malaya, sedangkan Belanda kembali membangun kontrolnya di Hindia Timur. Peristiwa 19 Agustus 1816 menutup babak penting dalam sejarah kolonial Jawa dan sekaligus memulai fase baru di bawah pemerintahan Hindia Belanda.

KESIMPULAN

Invasi Inggris ke Jawa pada tahun 1811 merupakan konsekuensi langsung dari melemahnya kekuasaan Belanda akibat Perang Napoleon, yang memberi peluang bagi Inggris untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles membawa serangkaian reformasi yang bertujuan merombak tata kelola kolonial, termasuk penerapan sistem Landrente, Indirect Rule, penghapusan perbudakan, serta restrukturisasi birokrasi. Kebijakan-kebijakan tersebut menghasilkan perubahan mendasar dalam struktur politik dan administrasi Jawa, serta mendorong integrasi ekonomi ke dalam jaringan perdagangan global. Namun, reformasi tersebut juga menciptakan persoalan baru berupa beban pajak yang berat, ketidakstabilan politik, dan tekanan sosial bagi masyarakat, terutama petani. Pada akhirnya, pemerintahan Inggris di Jawa berakhir seiring perubahan besar dalam politik Eropa setelah kekalahan Napoleon dan diberlakukannya Konvensi London 1814, yang mewajibkan Inggris mengembalikan Jawa kepada Belanda. Dengan demikian, periode singkat kekuasaan Inggris meninggalkan warisan yang kompleks, mencakup inovasi administratif sekaligus problematika sosial-ekonomi yang tetap memengaruhi dinamika masyarakat Jawa pada masa kolonial selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. 6(1), 974–980.
- Hariyono, & Wijaya, D. N. (2016). Thomas Stamford Raffles : Seorang Universalis Atau Imperialis ? 26(1), 33–44.
- Noor, F. A. . (2014). Anti-Imperialism in the 19 th Century : A Contemporary Critique of the British Invasion of Java in 1811. 279.
- Nurbaiti, B. (2025). Warisan Kebijakan Daendels dan Raffles: Dampaknya terhadap Perubahan Sosial dan Tata Kelola Indonesia Kontemporer.
- Rosmaida Sinaga, Andrian Maulana, Rifka Ariani Lubis, M. M. S. (2024). Kemajuan dan Kontroversi Kebijakan Agraria Raffles. 1(2), 529–537.
- Setyawan, Y. H. (2020). Peran Sir Thomas Stamford Raffles Dalam Sistem Pajak Bumi Di Pulau Jawa Tahun 1811-1816. *Historical Studies Journa*, 65–76.
- Sinaga, R., Maulana, A., Lubis, R. A., Sitepu, M. M., Sejarah, J. P., Sosial, F. I., Medan, U. N., Medan, K., & Utara, P. S. (2024). Kebijakan Inggris Dalam Kepemimpinan Thomas Raffles Di Indonesia. 1(2), 180–187.
- Syafaah, A. (2018). Kelas Sosial Dalam Sistem Landeliijk Stelsel Masa Raffles (1811-1816). 6(1), 133–146.
- Utomo, A. P. (2018). Biografi Tokoh Dunia: Sir Stamford Raffles, Penulis Sejarah Jawa. Kompas.Com.

<https://doi.org/http://internasional.kompas.com/read/2018/07/05/22284481/biografi-tokoh-dunia-sir-stamford-raffles-penulis-sejarah-jawa>

- Wahyu, R., & Putro, S. (N.D.). Dominasi Jawa Dalam Narasi Sejarah Kolonial: Telaah Historiografis Terhadap Pilihan Geografis Dalam The History Of Java Oleh Raffles The Dominance Of Java In Colonial Historical Narratives : A Historiographical Study Of Geographical Selection In The History.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektifbimbingan Dan Konseling. 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/Q.V1i1p1-10.497>
- Yusup Hari Setyawan. (2020). Peran Sir Thomas Stamford Raffles Dalam Sistem Pajak Bumi Di Pulau Jawa Tahun 1811-1816. 65–76.